

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Wacana pemikiran politik selama ini banyak didorong dan dikembangkan oleh ilmuwan barat. Pertumbuhan pemikiran politik barat sampai-sampai diposisikan sebagai acuan tunggal dalam perbincangan terkait dengan pengalokasian nilai kekuasaan (negara) terhadap kehidupan society. Perbincangan ini semakin berkembang pesat disaat Negara-negara barat menjadikan dirinya sebagai kekuatan yang maju dari pada negara-negara lainnya. Hal yang sangat mendasar dari perbincangan politik barat, adalah tertitik tolak kepada konsep power dari pemerintah kepada rakyatnya, sampai pada sesuatu yang sifatnya terbatas, dimana menjadikan pemegang kekuasaan untuk melakukan *struggle for power* terhadap Negara-negara lain yang memungkinkan terjadinya konflik atau kerjasama.

Kita melihat, dan menemukan kenyataan dalam sistem pemerintahan pada suatu negara adanya persoalan kemasyarakatan yang tidak mudah dipecahkan, kita menatap dan tahu adanya aturan kemasyarakatan yang tidak mampu merealisasikan keadilan. Maka di saat itulah kita lalu menunjukkan perhatian kita ke Eropa, Amerika, dan Rusia (negara Barat) untuk mengambil sesuatu dari mereka dalam upaya kita untuk memecahkan kesulitan yang kita hadapi. Sedangkan pada saat kita mengimpor prinsip-prinsip, undang-undang dan sistem, maka kita sama sekali tidak melakukan hal seperti itu, kita tidak

memandang perlu untuk menggali kekayaan rohaniah kita, nilai-nilai konseptual, dan semua upaya yang memungkinkan kita melihat terlebih dahulu asas dan prinsip yang kita miliki. Kita begitu saja mengambil prinsip demokrasi, kapitalisme, sosialisme, ataupun komunisme darinya. Kita mengambil sesuatu dalam upaya kita memecahkan persoalan kemasyarakatan kita, betapa pun berbedanya corak, watak, aturan, sejarah, dan nilai-nilai baik materi, konsep dan kejiwaan kita dengan watak bangsa yang berbeda di seberang lautan dan di balik awan.

Menurut pemikiran para tokoh-tokoh Islam yang berbeda pandangan dalam melihat pengalokasian politik sebagai nilai kekuasaan, seperti Taqiyudin an-Nabhani, Hasan al-Banna, Sayyid Quthb, dan A'la al-Maududi bila di ambil benang merahnya "Islam adalah sistem kehidupan yang sempurna, meliputi sistem politik, sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Mereka sama-sama menginginkan terwujudnya kembali Khilafah Islamiyah yang bisa menyatukan seluruh dunia. Islam yang terpecah sejak runtuhnya Khilafah Islamiyah di Turki (1924)".¹ Pandangan Islam dalam melihat kekuasaan adalah hal yang sudah sempurna tanpa harus mengambil pijakan selain al-Quran dan as-Sunah, karena kekuasaan dalam Islam hanya sebagai pelayan masyarakat dari wahyu yang diturunkan Tuhan kepada hamba-Nya.

¹ Nuim Hidayat, *Sayyid Quthb Biografi dan Kejernihan Pemikirannya*, Cet. I (Jakarta: Penerbit Gema Insani, 2005), hlm. XVI.

Maka pertanyaan yang muncul dari politik Islam dan perlu kiranya di jawab, sebenarnya siapa yang berdaulat atas negara Islam, rakyat atau Tuhan? Firman Allah SWT dalam QS. Al-An'am (6) :57² dan QS. Al-Baqarah: 30.³

Dan pada akhirnya konsep pemerintahan Islam harus mengalami ujian yang berat terjadi di negara Islam Mesir, ketika revolusi Juli 1952 di Mesir, Gamal Abdul Nasser yang kemudian mengkhianati Quthb, Nasser mengajak Quthb dan Ikhwan untuk bersama-sama menggulingkan raja Faruk. Nasser dan Quthb akhirnya berpisah, karena Quthb menginginkan negara Islam, sedangkan Nasser menginginkan negara Sosialis.⁴ Dalam hal inilah Sayyid yang menginginkan terbentuknya negara yang berdasarkan al-Quran dan Sunnah, yang pernah diimplementasikan oleh pemerintahan Rasulullah dan para Khilafah.

B. Latar Belakang Masalah

Umat Islam menganggap keanekaragaman dunia sebagai tanda rahmat Tuhan, dan kesempatan untuk menjauhi rasisme dan khauvinisme. Umat Islam merasa bahwa karena kita semua diciptakan oleh Tuhan, kita tidak boleh mengatakan bahwa satu orang lebih baik dari orang lainnya atas dasar kriteria

² "Katakanlah, "Sesungguhnya aku (berada) di atas hujjah yang nyata (al-Qur'an) dari Tuhan ku sedang kamu mendustakannya. Bukanlah wewenangku (untuk menurunkan azab) yang kamu tuntutan untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah, Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik".

³ "Ingatlah ketika Tuhan mu berfirman kepada para malaikat, 'Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi.....'"

⁴ Nuhim Hidayat, *Sayyid Quthb Biografi dan Kejernihan Pemikirannya*, hal. XX.

yang tidak berada di bawah kekuasaan kita. Nasihat Nabi Muhammad kepada para pengikutnya:

“Semua manusia berasal dari Adam dan Hawa. Seorang Arab tidak lebih baik dari orang non-Arab, dan orang non-Arab tidak lebih baik dari orang Arab. Juga, orang berkulit putih tidak lebih baik dari orang berkulit hitam, dan orang berkulit hitam tidak lebih baik dari orang berkulit putih, kecuali karena ketakwaan dan amal mereka. Ketahuilah bahwa setiap orang Islam adalah saudara bagi orang Islam lainnya, dan orang-orang Islam itu bersaudara”.⁵

Dunia Islam yang kita kenal saat ini, bukan berdasar bahasa Arab yang digunakan, atau karena munculnya Islam di wilayah atau negara tertentu. Maksud dari dunia Islam adalah bagian dari dunia antara Maroko hingga Merauke, negeri-negeri tempat umat Islam merupakan golongan mayoritas. Tempat-tempat yang termasuk dunia Islam antara lain adalah Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Nigeria, Sudan, Mesir, Eritaria, Suriah, Yordania, Irak, Iran, Lebanon, Saudi Arabia, Afganistan, Pakistan, Patani (Thailand Selatan), Malaysia, Filipina Selatan, dan Indonesia.⁶

Negara-negara dengan populasi umat Islam terbesar, ada di negara Indonesia dengan umat Islam 228,4 juta orang, negara Pakistan dengan 144,6 juta umat Islam, negara India dengan 123,6 juta umat Islam, negara Bangladesh dengan 31,3 juta umat Islam.⁷

Orang-orang dan masyarakat Islam terdapat di hampir seluruh dunia: Afrika, Asia, Timur Tengah, Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan

⁵ Christine Huda D. *Kebenaran Islam Segala Hal tentang Islam A-Z*, terj. Ahmad Asnawi, Cet. I (Jogjakarta: Diglossia, 2006), hal. 36.

⁶ H.Endang Saifuddin A.,M.A. *Wawasan Islam: Pokok-pokok Pikiran tentang Paradigma dan Sistem Islam*, Cet. I (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm 272.

⁷Christine Huda D. *Kebenaran Islam Segala Hal tentang Islam A-Z*, hm. 37-38.

Oseania. Konsentrasi terbesar umat Islam terdapat di Asia dan Afrika, sedangkan masyarakat minoritas Islam terdapat diseluruh dunia. Saat ini terdapat sekitar 1,2 milyar orang Islam di dunia, kurang lebih seprlima dari populasi dunia, menjadi Islam sebagai agama terbesar kedua setelah kristen. Lebih dari itu, berkat tingginya angka kelahiran dan pindah agama, saat ini Islam diyakini merupakan agama dengan pertumbuhan tercepat di seluruh dunia. Kita semua mengetahui bahwa Islam sendiri, muncul dan berkembang didaratan gersang dan tandus tanah Arab, tapi dalam kenyataannya umat Islam dengan populasi lebih dari 1,2 milyar muslim, tidak terdapat di tanah Arab. Ada lebih lima puluh negara di dunia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Meskipun Islam sering diasosiasikan dengan dunia Arab, kurang dari 15% umat Islam dunia berkebangsaan Arab. Kenyataannya, dalam sebuah survei tahun 2001 tentang negara-negara dengan populasi Muslim terbesar, hanya ditemukan satu bangsa Arab (Mesir).⁸

Persoalan-persoalan yang di hadapi dunia Islam pada dasarnya beraneka ragam. Tapi pada dasarnya orientasi dari kolonialisme adalah invansi kekayaan alam, penyebaran paham barat, dan memperluas ajaran kriterisasinya. Umat Islam di pelbagai negeri dan negara menghadapi persoalan masing-masing yang beraneka ragam. Palestina, negeri umat Islam diduduki dengan tidak sah oleh Zionis Yahudi. Penduduk asli Muslim diusir dari tanah airnya. Umat Islam di Cyprus tidak diberi tempat hidup oleh umat Kristen Ortodoks. Di Nigeria terjadi kekacauan yang mengakibatkan kepala

⁸ Christine Huda D. *Kebenaran Islam Segala Hal tentang Islam A-Z*, hal. 37.

negaranya yang merupakan seorang muslim dan Ahmado Belou, seorang pemimpin muslim tewas. Umat Islam di Patani, Siam Selatan dijajah dengan bengisnya oleh penguasa Thailand yang beragama Buddha. Umat Islam di Arabia Selatan berkorbar lama perang saudara. Umat Islam di Filipina bagian selatan sejak lama mendapat tekanan dan tindasan dari penguasa yang beragama Khatolik. Umat Islam di Indonesia antara lain menghadapi kampanye kristenisasi dan sekularisasi.⁹

Masalah yang lain misalnya, ladang minyak Amerika hanya bisa memproduksi 18 barrel perhari, sementara ladang minyak Arab Saudi bisa memproduksi 18.000 barrel perhari untuk kurun waktu lebih dari 45 tahun, dari sini tampak jelas bahwa kawasan Teluk Arab merupakan kawasan terpenting di dunia, dan menjadi incaran kekuatan-kekuatan yang tamak dan zalim. Karena itu, jelas bahwa kekuatan yang mempunyai hegemoni terhadap kawasan ini akan berkuasa terhadap urat nadi kehidupan dunia Barat, dan bisa saja mencekik Barat sampai mati.¹⁰

Pergerakan negara-negara Eropa ke negeri-negeri Islam berlanjut ketika Napoleon menyerang Mesir, Inggris memasuki semenanjung Arabia, dan Ferdinand de Lessep membangun Terusan Suez.¹¹

Dalam sejarah pertumbuhan dan perkembangan Islam, dunia mengenal berbagai macam sistem politik, dan Islam bukanlah bagian di antara sistem-

⁹ H.Endang Saifuddin, *Wawasan Islam: Pokok-pokok*, hlm. 272-273.

¹⁰ Dr.Safar Al-Hawali. *Belitan Amerika di Tanah Suci: Membongkar Strategi AS Menguasai Timur Tengah*, terj. H. Sarwedi M. Hasibuan, Lc. Cet. II (Solo: Jazeera, 2005), hal.18.

¹¹ Christine Huda D. *Kebenaran Islam Segala Hal tentang Islam A-Z*, hal.362.

sistem itu, serta sedikit pun tidak memiliki kaitan dengan semuanya itu. Islam merupakan sistem yang berdiri sendiri, mandiri dalam konsepsi dan sarana yang dipergunakannya. Karena itulah, maka kita wajib pula mengemukakannya secara tersendiri pula, bahwa Islam tumbuh sendiri dan memenuhi jalannya sendiri.¹² Karena dalam Islam mencakup keseluruhan bidang yang ada di dunia sekarang ini, "Islam adalah sistem kehidupan yang sempurna, meliputi sistem politik, sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain", seperti keterangan diatas.

Secara teologis, Islam adalah sistem nilai dan ajaran yang bersifat ilahiyah dan karena itu bersifat transenden. Tetapi, secara sosiologis, ia adalah merupakan fenomena peradaban, kultural dan realitas sosial dalam kehidupan manusia. Islam dalam realitas sosila tidak sekedar sejumlah doktrin yang bersifat menzaman dan menjagatraya (universal), tetapi juga mengejahwantakan diri dalam institusi-institusi sosila yang dipengaruhi oleh situasi dan dinamika ruang dan waktu.¹³ Kaum muslim percaya, bahwa Islam mencakup semua aspek kehidupan, Islam memiliki bentuk hubungan antar Khalik dengan mahluk-Nya, hubungan antara sesama mahluk dengan alam semesta dan kehidupan, hubungan antar manusia dengan dirinya: antara

¹² Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, terj. Afif Mohammad, Cet. II (Bandung: Penerit Pustaka, 1994), hlm. 123.

¹³ Azyumardi Azra. *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme. Modernisme hingga Post-Modernisme*, Cet. I, (Jakarta: Paramadina, 1996), hal. 1.

individu dan masyarakat, antara individu dan negara, antar seluruh umat manusia, dan antara generasi yang satu dengan generasi yang lainnya.¹⁴

Dr. V. Fitzgerald berkata, “Islam bukanlah semata agama (*a religion*), namun juga merupakan sistem politik (*a political system*). Meskipun pada dekade-dekade terakhir ada beberapa kalangan dari umat Islam yang mengklaim sebagai kalangan modernis, yang berusaha memisahkan kedua sisi itu, namun seluruh gugusan pemikiran Islam dibangun di atas fundamen bahwa kedua sisi itu saling bergandengan dengan selaras dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain”. Prof. Gibb juga menambahkan, katanya “Dengan demikian, jelaslah bahwa Islam bukanlah sekedar kepercayaan agama individual, namun ia meniscayakan berdirinya suatu bangunan masyarakat yang independen. Ia mempunyai metode tersendiri dalam sistem pemerintahan, perundang-undangan, dan institusi”.¹⁵

Tidak heran jika ajaran Islam dalam perjalanannya digunakan sebagai konsep atau diterapkan dalam sistem pemerintahan di suatu negara, khususnya negara-negara dimana Islam muncul dan berkembang pertama kalinya, dan di dunia pada umumnya. Jean L’Heureux mengatakan:

“Islam memiliki daya takhluk secara damai terhadap jiwa dengan kesederhanaan teologinya, kejelasan dogma dan asas-asasnya, dan jumlah yang tertentu amalan praktis yang dipintahkannya. Berlawanan dengan Kristen yang telah mengalami transformasi yang terus-menerus sejak awal, Islam tetap sama sejak awal”.

Dan Sirojini Naidu juga berpendapat terhadap Islam:

¹⁴ Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, hal. 25.

¹⁵ Dr.M. Dhiauddin Rais. *Teori Politik Islam*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 5-6.

“Rasa keadilan adalah satu cita Islam yang paling mengagumkan karena sebagaimana yang saya telaah dalam al-Qur’an, saya dapatkan asas-asas hidup yang dinamis, bukan mistis melainkan etika praktis untuk peri-hidupan sehari-hari yang cocok untuk seluruh dunia”, “Terhapusnya kesadaran ras di kalangan kaum muslimin merupakan salah satu hasil Islam yang hebat dan di dunia dewasa ini merupakan kebutuhan yang sangat diharapkan perlunya penyiaran kebaikan Islam ini.....” oleh Arnold J. Toynbee.¹⁶

Penyerangan atau penjajahan sampai pada hegemoni Barat, sangat berpengaruh terhadap negara-negara Islam dalam berjalannya waktu. Pengaruh yang ditimbulkan bukan hanya pada sumber alam yang di kuasai, atau pun ajaran kristenisasi, tapi sampai pada pengaruh paham-paham Barat yang diadopsi negara-negara Islam.

Pengaruh yang sangat mencolok dalam politik pemerintahan diantaranya adalah paham Demokrasi. Demokrasi, harus diakui merupakan sistem pemerintahan yang paling banyak dianut di dunia. Sejak Perang Dunia II hampir seluruh negara di dunia mengadopsi sistem demokrasi. Riset UNESCO tahun 1949 menyimpulkan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, demokrasi diklaim sebagai sistem paling ideal dari semua sistem politik dan sosial yang ada.¹⁷

Menurut pengertian hakiki demokrasi ini, baik dari segi bahwa kekuasaan membuat hukum menetapkan halal dan haram, terpuji dan tercela ada di tangan rakyat maupun dari segi tidak adanya keterikatan dengan hukum-hukum syariah dengan dalih kebebasan. Orang-orang kafir memahami betul bahwa kaum Muslim tidak akan pernah menerima demokrasi dengan

¹⁶ H.Endang Saifuddin, *Wawasan Islam: Pokok-pokok*, hlm. 256-258.

¹⁷ <http://khilafah1924.org/2010/11/22/>.

pengertiannya yang hakiki itu. Oleh karena itu, negara-negara kafir penjajah (khususnya AS saat ini) berusaha memasarkan demokrasi di negeri-negeri kaum Muslim. Mereka berupaya memasukkan demokrasi itu ke tengah-tengah kaum Muslim melalui upaya penyesatan (*tadhliil*), bahwa demokrasi merupakan alat untuk memilih penguasa. Mereka berupaya menutupi dan melipat bagian mendasar dari demokrasi itu sendiri, yaitu tindakan menjadikan kewenangan membuat hukum serta menetapkan halal dan haram berada di tangan manusia, bukan di tangan Tuhan manusia. Bahkan sebagian aktivis Islam, termasuk di antaranya adalah para syaikh (guru besar), mengambil tipuan itu; baik dengan niat yang baik maupun buruk. Jika Anda bertanya kepada mereka tentang demokrasi, mereka menjawab bahwa demokrasi hukumnya boleh dengan anggapan, demokrasi adalah memilih penguasa. Adapun mereka yang memiliki niat buruk berupaya menutupi, melipat, dan menjauhkan pengertian hakiki demokrasi sebagaimana yang ditetapkan oleh penggagas demokrasi itu sendiri. Menurut mereka, demokrasi bermakna: kedaulatan ada di tangan rakyat yang berwenang membuat hukum sesuai dengan kehendak mereka berdasarkan suara mayoritas, menghalalkan dan mengharamkan, serta menetapkan status terpuji dan tercela; individu memiliki kebebasan dalam segala perilakunya bebas berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya, bebas meminum khamr, berzina, murtad, serta mencela dan mencaci hal-hal yang disucikan dengan dalih demokrasi dan kebebasan individual. Inilah hakikat demokrasi. Inilah realita, makna, dan pengertian demokrasi. Lalu bagaimana bisa seorang Muslim yang mengimani Islam

mengatakan bahwa demokrasi hukumnya boleh atau bahwa demokrasi itu berasal dari Islam?¹⁸

Di masa perkembangan Islam, paham-paham Barat ikut mengiringi perjalanannya, karena kebanyakan negara-negara Islam berada dibawah kekuatan Barat. Pengaruh pemikiran Barat terhadap dunia atau khususnya terhadap dunia Islam sampai pada posisi dominasi. Dimana perkembangan pemikiran Barat menjadi acuan tunggal, khususnya poin penting dalam hal demokarsi seperti di terangkan di atas.

Dalam soal politik demokrasi ini, pengaruh cara berfikir ala Barat telah mengubah cara pandang dunia mengenai sistem politik pemerintahan tiap-tiap negara di dunia. Demokrasi merupakan alat atau jalan Barat untuk menguatkan dari pada dominasi Barat terhadap dunia, lantaran melalui diciptakannya negara-negara di dunia khususnya negara-negara Islam memiliki ketergantungan (dependensia) terhadap Barat. Ketergantungan di ciptakan melalui kolonialisme politik dan ekonomi dalam bentuk neoliberalisme.

Selain itu, penguasaan ilmu intelektual dalam teknologi di kuasai oleh Barat. Jadi tidak heran bila Barat sekarang menjadi kiblat dari negara-negara Islam yang merupakan bagian dari negara-negara terbelakang.

Maka pada tahun 1948-1950, Sayyid Quthb berkunjung ke Amerika Serikat untuk belajar tentang metode pendidikan Barat. Alasannya tidak lain,

¹⁸ <http://www.syabab.com/2010/11/22/>.

adalah anggapan Quthb bahwa negara Barat merupakan ikon kemajuan dan peradaban yang maju di bandingkan dengan negara-negara lain.

Pengalaman Quthb lebih dari dua tahun di Amerika itu, nampaknya menjadi titik balik yang penting dalam hidupnya. Quthb bukan menjadi pengagum Amerika, malah justru menjadi pengkritik Amerika (Barat) yang tajam dan segera setelah ia kembali ke Mesir pada tahun 1952.

Meskipun kepergiannya ke AS didorong oleh kekagumannya atas negara itu, tidak urung ia mengalami “kejutan budaya”. Hal ini kemudian membuatnya menjadi semakin religius dan semakin yakin bahwa dekadesi moral dan pandangan anti Arab yang dialami AS. Quthb juga terpukul oleh fenomena kebebasan seksual dan pelacuran yang meraja lela di AS. Juga pemakaian alkohol secara bebas, dan pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan tanpa batas.¹⁹ Pada intinya Quthb tidak setuju atas paham kebebasan yang ada di Barat, dan herannya lagi, Barat yang mengalami degradasi moral tersebut malah menjadi kiblat dari negara-negara yang ada di dunia.

Meskipun dunia berkiblat dan di domiansi oleh Barat, tapi keinginan (para pemikir Islam) untuk membentuk negara Islam tetap ada, meski dalam bayang-bayang paham Barat. Sejumlah ilmuwan Muslim telah tampil dan berusaha merumuskan konsep-konsep dasar mengenai negara Islam dalam memahami pemikiran para pemikir politik Islam.

¹⁹ Nuhim Hidayat, *Sayyid Quthb Biografi dan Kejernihan Pemikirannya*, hal. 41-42.

Pendapat al-Mawardi (w.450/1058) mengenai bentuk negara, kendatipun pemimpin negara dipilih tetapi dia tetap memilih negara sistem monarki yaitu sistem kerajaan yang sedang berkembang di masanya. Al-Mawardi juga memberi syarat calon pemimpin negara harus berbangsa Arab dan bersuku Quraisy. Pendapat Ibnu Khaldun (w.809/1406) seorang pemimpin negara Islam harus bersuku Quraisy, bentuk pemerintahan monarki. Pendapat Imam Khomaini, jelas-jelas mengatakan bahwa dalam pemerintahan Islam kedaulatannya hanya milik Allah semata. Dan juga pendapat A'la Maududi (w.1979) menolak demokrasi secara prinsipal, bahkan menganggapnya sama dengan syirik. Dia beralasan bahwa dalam demokrasi itu rakyat dapat menetapkan hukum sendiri dan karenanya dapat pula melaksanakan semua aspirasi yang mereka miliki, padahal sebenarnya rakyat muslim tidak dapat berbuat seperti itu, kebebasan mereka dibatasi oleh Allah. Pendapat Fazlur Rahman, menolak konsep kedaulatan Tuhan seperti yang dikemukakan Imam Khomaini dan Mawdudi, bila kita mengakui pendapat seperti itu, berarti kita mengakui bahwa Allah itu berdaulat secara politik. F. Rahman lebih memilih sistem pemerintahan demokrasi, karena kepala negara harus dipilih secara bebas oleh rakyat.²⁰

Pemikir Islam yang lain, seperti Rasyid Ridha, dia membedakan antara bagian-bagian syari'at yang berhubungan dengan masalah ketuhanan yang baku, dan bagian-bagian yang membahas perilaku sosial: semua ini dapat

²⁰ M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam menurut Fazlur Rahman*, Cet. I (Yogyakarta: UUI Press, 2000), hal. 4-6.

diadaptasikan sesuai dengan prinsip kemaslahatan.²¹ Abdurraziq, yang hampir sama pemikirannya, menurutnya ada pemisahan otoritas agama dan politik, dan sekulerisasi lembaga kekhilafahan. Menurutnya bahwa Muhammad tidak bermaksud mendirikan sebuah negara dan bahwa Islam tidak menetapkan sistem politik tertentu.²²

C. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang permasalahannya, maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya, sebagai berikut:

Bagaimanakah Pemikiran Sayyid Quthb tentang Politik Pemerintahan dalam Islam?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah, Penulis melakukan penelitian terhadap pemikiran Sayyid Quthb tentang Politik Pemerintahan dalam Islam, dengan beberapa tujuan yaitu:

1. Memahami dan membedah pemikiran Sayyid Quthb tentang Politik Pemerintahan dalam Islam.
2. Mendeskripsikan dan mengkonseptualisasikan pemikiran Sayyid Quthb mengenai Politik Pemerintahan dalam Islam.

²¹ Antony Black, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, terj. Abdullah Ali dan Mariana Ariestyawati, Cct. I (Jakarta: PT.Serambi Ilmu Semesta, 2006), hlm. 566.

²² Antony Black, *Pemikiran Politik Islam*, hlm. 569.

3. Melakukan penggalian gagasan pemikiran tentang Politik Pemerintahan dalam Islam dalam rangka menambah khazana pengetahuan tentang Politik Pemerintahan Islam khususnya mahasiswa dan masyarakat umum di Indonesia.
4. Memberikan gambaran dan menjawab permasalahan apakah politik pemerintahan Islam Sayyid Quthb relevan dalam penerapannya di suatu Negara.
5. Memperdalam wacana tentang Politik Pemerintahan dalam Islam dan secara intelektual merupakan tanggungjawab, Artinya, bermanfaat untuk melatih kemampuan intelektual dan mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat, serta sebagai uji materi seorang mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya.

E. Kerangka Dasar Teori

Teori adalah generalisasi yang abstrak mengenai beberapa fenomena, dalam menyusun generalisasi itu teori selalu memakai konsep. Konsep lahir dalam pemikiran manusia dan karena itu bersifat abstrak, sekalipun fakta-fakta dapat di pakai sebagai batu loncatan. Oleh karenanya secara sederhana teori secara istilah 'susunan batu bata' dalam kerangka pendekatan dalam menjawab permasalahan agar lebih mudah.

Dari penjelasan teori diatas, bahwa penulis dalam membedah permasalahan dengan menggunakan critical theory menurut Robert Cox.

Robert Cox (lahir 1926) adalah seorang mantan ilmu politik profesor di Universitas York di Toronto, Kanada. Dia mengajar di sana 1977-1992. Dia adalah direktur umum dan kemudian kepala Buruh Internasional Organisasi's Divisi Perencanaan Program dan di Jenewa, Swiss. Setelah keberangkatannya dari ILO ia mengajar di Columbia University. Ia dikutip sebagai salah satu pemimpin intelektual bersama dengan Susan Strange dari Sekolah Inggris Ekonomi Politik Internasional dan masih aktif sebagai sarjana setelah pensiun formalnya, sesekali menulis dan memberikan ceramah.

Cox lulus pada tahun 1946 dari McGill University di Montreal, dimana ia menerima gelar Master dalam sejarah. Setelah lulus dia bekerja untuk Organisasi Buruh Internasional dimana ia akan tetap selama seperempat abad, membantu untuk mengatur dan desain Institut Internasional untuk Studi Ketenagakerjaan .

Dalam karir akademiknya Cox dikenal untuk kemerdekaan sengit dan tantangan yang teguh dari ortodoksi serta pendekatan sejarah. Sementara kontribusi ilmiah awal selama waktunya di Columbia University cukup konvensional dan berfokus pada organisasi internasional, berikut dari pengalamannya di ILO, ia segera mengadopsi perspektif yang lebih radikal. Selama waktunya di York University dia mulai menegaskan kembali dirinya secara historis, reflektif pelatihan sebelumnya di McGill University, yang memungkinkan dia untuk mengambil tema yang lebih ambisius. Cox

menjelaskan kepentingan akademis sebagai tidak kurang dari pemahaman, "struktur yang mendasari dunia".²³

Pemikiran critical theory menurut Robert Cox dalam hal ini, adalah bagaimana kerangka berpikir kritis manusia mampu membentuk sebuah teori kritis. Sebuah kalimat terkenal dari Robert Cox berbunyi;

"Teori selalu ditujukan untuk seseorang dan suatu tujuan"

Dengan kata lain, pengetahuan tidak pernah menjadi objektif dan abadi. Secara historis, teori kritis muncul sejak zaman Pencerahan (Enlightmen) yang memunculkan kritik kehidupan manusia mengenai universalisme dan kebebasan.²⁴

Teori-teori kritis adalah teori-teori yang lahir dari adanya ketidaksetaraan dalam suatu sistem, atau yang disebut sebagai structural inequality yang inherent di dalam suatu sistem internasional. Teori-teori Kritis secara struktur dikatakan sebagai teori kritis karena mereka (teoritisi teori kritis) mengkritik *status quo* yang ada didalam hubungan internasional.²⁵

Kekuatan-kekuatan atau kemajuan yang dimiliki oleh Barat ditujukan untuk melayani kepentingan elit-elit yang berkuasa dan bertujuan untuk melegitimasi status quo. Hegemoni Barat dalam hal ini adalah, mempertahankan dari pada status quo Barat terhadap eksistensinya di negara-negara yang ada di dunia. Cox membedakan antara problem solving theory

²³http://translate.google.co.id/translate?hl=id&langpair=en|id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Cox

²⁴ <http://theamazing-grace.blogspot.com/2010/03/pemikiran-kritis-critical-theory.html>

²⁵ <http://robinmandagie.blogspot.com/2009/05/critical-theory-asumsi-neomarxisme.html>

yang menerima parameter dari order yang telah ada dan critical theory yang berupaya untuk menentang order yang ada dengan cara mencari, menganalisis, dan mendukung proses sosial yang dapat mengarah pada perubahan emansipatoris.²⁶

Teori kritis HI dalam hal ini, mencari pengetahuan untuk tujuan politis, yaitu untuk membebaskan kemanusiaan dari struktur politik dan ekonomi dunia yang 'menekan' dan dikendalikan oleh kelas hegemon Barat seperti Amerika Serikat. Mereka berupaya untuk mendobrak dominasi global kelas negara kaya di belahan Utara dunia atas kelas negara miskin yang mayoritas berada di Selatan dunia. Oleh karena itu, tak jarang bila teori kritis sering dikaitkan dengan teori Ekonomi Politik Internasional.²⁷

Pada intinya, teori kritis juga berusaha menyadarkan kepada para semua penstudi sosial khususnya hubungan internasional bahwa sesuatu yang bersifat sosial tidak memiliki konsep kebenaran mutlak. Nilai-nilai universalitas yang diusung oleh teori pendahulunya mencoba dipatahan dengan menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan sosial bersifat parsial dan tidak akan pernah lepas dari pemikiran yang bersifat ideologis dari para pemikirnya sehingga menyebabkan hal tersebut tidak bebas nilai. Oleh karena itu, latarbelakang dari pada pemikir mempunyai arti penting dalam analisa fenomena-fenomena yang berkembang saat ini.

²⁶ <http://alfalahconnection.wordpress.com/2007/07/31/teori-marxis-dalam-hubungan-internasional/>

²⁷ <http://pejuanghi.blogspot.com/2010/05/critical-theory-kritisasi-terhadap.html>

F. Hipotesa

Hipotesa adalah jawaban sementara, dari uraian latar belakang masalah yang di jawab melalui kerangka dasar teori. Dan hipotesa dari Politik Pemerintahan dalam Islam menurut Sayyid Quthb bahwa:

- 1) Deskripsi pemikiran Sayyid Quthb, dimana dalam hal ini mendeskripsikan politik pemerintahan Islam, dalam konsep rakyat atau ummat, sistem kepemimpinan (kebijakan) dan pengangkatan pemimpin, pembangkangan terhadap pemerintah, sistem politik Islam, hukum Islam. Serta perbedaan antara konsep politik Islam Quthb dengan politik Barat.
- 2) Politik pemerintahan dalam Islam yang dibangun atas asas-asas: Keadilan penguasa, ketaatan rakyat, dan permusyawaratan antara penguasa dengan rakyat. Ini merupakan garis-garis besar yang bersifat dasar.
- 3) Pemikiran Sayyid Quthb tentang “integral”, memahami penyatuan yang ada dalam pandangan Islam tentang alam, kehidupan dan manusia, maka disaat yang sama kita bisa pula menghayati garis-garis dasar bagi keadilan sosial dalam Islam.

Islam memandang manusia sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara kebutuhan rohani dan dorongan jasmaniahnya, antara kebutuhan spiritual dan kebutuhan material. Islam memandang alam semesta dan kehidupan dengan kacamata integral yang tidak beraneka dan tidak terpisah-pisah.²⁸

²⁸ Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, hlm. 34.

G. Jangkauan Penelitian

Agar pembahasan tidak terlalu meluas, tersusun secara sistematis dan mudah di pahami maka penulis hanya melihat dari permasalahan Politik Pemerintahan Islam menurut Sayyid Qutub. Serta bentuk-bentuk pemerintahan Islam pada masa Rasulullah sebagai acuan Sayyid Qutb dalam mengeluarkan konsep pemerintahannya.

Dengan kerangka dasar *critical theory* menurut Robert Cox, dalam menjelaskan bentuk-bentuk hegemoni Barat terhadap negara Islam, diharapkan menjadi pisau analisa terhadap perlawanan Islam kepada Barat, sebagai bentuk Politik Pemerintahan dalam Islam Menurut Sayyid Quthb, Insya Allah akan menemukan bentuk ideal dari penerapan sistem pemerintahan yang dapat menciptakan pemerintahan yang baik (*Good Governnance*). Dan juga dari pemikiran Sayyid Quthb ini.

H. Metode Penelitian

Agar penelitian ini mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan metode yang sesuai dengan obyek yang dikaji, karena metode berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Di samping itu metode merupakan cara bertindak supaya penelitian berjalan terarah dan efektif dan mencapai hasil yang maksimal.

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penulis akan meneliti data-data yang bersumber dari literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, dalam hal ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan topik permasalahan yang akan dibahas. Di mana penulis terlebih dahulu menelusuri berbagai buku yang ada relevansinya dengan tema yang akan dikaji.

Dalam penelitian ini penulis menganalisis penelitian ini berusaha untuk menggambarkan secara menyeluruh dengan mengemukakan hal-hal yang melatarbelakangi pemikiran Sayyid Quthb, juga melakukan tela'ah terhadap pernyataan-pernyataan dan makna yang dikandung di dalam pemikiran tersebut sehingga menghasilkan gambaran secara sistematis.

2) Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan melacak tulisan-tulisab atau buku-buku tentang Sayyid Qutub. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum tentang pikiran Sayyid Quthb. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Penulis menggunakan sejumlah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Adapun sumber utamanya adalah karya-karya Sayyid Quthb, diantaranya: *Keadilan Sosial Dalam Islam*, *Karakteristik Konsepsi Islam*, *Petunjuk Jalan*, *Al-Qiyamah*, *Indahnya AL-Quran berkisah*. Dan beberapa karya-karya tentang penulisan Sayyid Quthb,

seperti: *Sayyid Quthb Biografi dan Kejernihan Pemikirannya, Jihad Menurut Sayyid Quthb dalam Tafsir Zhilal, Butir-butir Pemikiran Sayyid Quthb Menuju Pembaharuan Gerakan Islam, Membangun Spirit Ruhiah Dengan Doa Disadur dari Fenomenal Sayyid Quthb "Fi-Zhilalil Qur'an", Fikih Pergerakan Sayyid Quthb Aku Wariskan Untuk Kalian.*

b. Data Sekunder

Merupakan sumber sekunder adalah karya-karya lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari *dokumen-dokumen, buku-buku, majalah, internet* yang bermanfaat untuk melengkapi informasi terhadap penelitian pemikiran Sayyid Quthb tentang Politik Pemerintahan Islam.

c. Pengolahan Data

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yakni mengumpulkan data yang ada, mengadakan analisa yang interpretatif dengan cara menyelami kemudian mengungkap arti dan nuansa yang di maksud oleh seorang tokoh. Selanjutnya untuk menganalisa data digunakan metode *deduktif*, yaitu menganalisa data-data yang bersifat umum, kemudian ditarik ke dalam kesimpulan yang bersifat khusus. Hal ini dilakukan untuk mengetahui data-data pemikiran Sayyid Quthb tentang Politik Pemerintahan dalam Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Di dalam penyajian penelitian ini, penulis membagi dalam beberapa bab agar setiap pembaca dapat memperoleh gambaran secara umum dalam setiap babnya.

Bab I, Pendahuluan yang memuat Alasan pemilihan Judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Permasalahan, Tujuan Penelitian, Kerangka Dasar Teori, Hipotesa, Jangkauan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan. Bab pertama dalam penelitian sangatlah penting, supaya penelitian ini dapat terarah dengan baik dan tidak melenceng dari konsep semula.

Bab II, dalam bab ini penulis ingin menjelaskan secara umum tentang, masalah-masalah pemikiran politik yang di hadapi oleh dunia Islam dari pengaruh-pengaruh pemikiran politik barat. Dan dampak negatif yang muncul.

Bab III, dalam bab ini penulis ingin menjelaskan tentang, biografi dari Sayyid Quthb, dan perlawanan Islam terhadap hegemoni Barat.

Bab IV, merupakan bagian sentral dalam penelitian ini, yakni pemikiran Sayyid Quthb yang di pengaruhi oleh kondisi sosialnya, dan kondisi global saat itu, serta pengalaman Quthb di Barat, memunculkan kritik tajam Quthb kepada Barat. Pemikiran Sayyid Quthb tentang Politik Pemerintahan dalam Islam menurut Sayyid Quthb.

Bab V, adalah bab terakhir yang memuat kesimpulan pembahasan yang disertai dengan saran-saran dan diakhiri dengan kata penutup.